

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Studi ini membahas tentang transparansi penyelenggaraan pemerintahan pada website Pemerintah Kota Surabaya. Tujuannya adalah untuk memahami dan menganalisis persepsi pengelola website Pemerintah Kota Surabaya terhadap konsep transparansi penyelenggaraan pemerintahan serta upaya apa saja yang dilakukan untuk memenuhi unsur-unsur transparansi penyelenggaraan pemerintahan selama ini. Selain itu juga untuk mengidentifikasi isi pesan pada website Pemerintah Kota Surabaya terkait upaya pemenuhan standar transparansi penyelenggaraan pemerintahan tersebut.

Transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah jaminan kesempatan bagi masyarakat untuk mengetahui “*siapa mengambil keputusan apa beserta alasannya*” (Tahir, 2014:122). Transparansi merupakan salah satu unsur tata pemerintahan yang baik atau *good governance*. Istilah tata pemerintahan yang baik merupakan suatu konsepsi tentang penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, demokratis dan efektif (Tahir, 2014:102). Don Tapscott & David Ticoll mendefinisikan transparansi sebagai aksesibilitas informasi kepada pemangku kepentingan lembaga, mengenai hal-hal yang mempengaruhi kepentingan mereka (Mesaros, 2011: 28).

Transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik atau sering

disebut dengan UU KIP. Sedangkan standar layanan informasi diatur dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. UU KIP ini mengatur tentang jenis-jenis informasi yang harus disediakan dan diumumkan oleh Badan Publik, hak dan kewajiban pemohon dan pengguna informasi serta Badan Publik, mekanisme permohonan informasi, tugas dan wewenang Komisi Informasi serta penyelesaian sengketa informasi.

Diberlakukannya UU KIP ini membawa konsekuensinya bagi Badan Publik dalam hal ini pemerintah untuk menyediakan informasi publik yang benar, akurat dan tidak menyesatkan. Salah satu kewajiban pemerintah dalam melaksanakan peraturan ini adalah menyediakan sarana dan prasarana layanan informasi publik berupa situs resmi bagi badan publik. Memanfaatkan situs resmi atau website untuk menyebarluaskan informasi publik adalah tepat karena internet memiliki fitur interaktivitas. Interaktivitas adalah sarana untuk mewujudkan partisipasi publik melalui media internet. Dengan adanya fitur interaktivitas ini sejumlah forum diskusi di internet bermunculan.

Website menurut Levy adalah sebuah lingkungan informasi yang terbuka, fleksible dan dinamis, yang memungkinkan, manusia mengembangkan orientasi pengetahuan yang baru dan juga terlibat dalam dunia yang demokratis tentang pembagian mutual dan pemberian kuasa yang lebih interaktif dan berdasarkan pada masyarakat. Dengan teknologi web 2.0 masyarakat bukan hanya dalam posisi sebagai pengguna informasi tetapi sekarang saatnya *user generated content*, artinya masyarakat sebagai pengguna bisa membuat konten sendiri. Dunia maya memberikan tempat pertemuan semu yang memperluas dunia sosial, menciptakan peluang

pengetahuan baru, dan menyediakan tempat untuk berbagi pandangan secara luas (Littlejohn & Foss, 2009:414).

Website yang bersifat interaktif ini sejalan dengan tujuan dari UU KIP yaitu menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik, mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan serta untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Organisasi yang belajar bagaimana untuk berpartisipasi, dialog dan berbagi informasi secara suka rela dengan masyarakat akan jauh lebih berhasil daripada mereka yang terus memproduksi konten dan mengharapkan penonton untuk datang dan mendapatkannya (Mesaros, 2011:42).

Internet berkembang dengan sangat cepat, jumlah penggunaanya juga semakin meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Asosiasi Pengguna Jasa Internet Indonesia (APJI) dan Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah pengguna internet di Indonesia pada tahun 2013 adalah 71,19 juta meningkat 13% dari tahun sebelumnya yaitu 62 juta pengguna pada tahun 2012. Pemanfaatan internet juga merupakan pelaksanaan dari Inpres Nomor 3 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan *e-government*. Pengembangan *e-government* merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien.

Transparansi penyelenggaraan pemerintahan sangat menarik untuk diteliti terutama di Surabaya mengingat Pemerintah Kota Surabaya telah berhasil

memperoleh penghargaan Badan Publik terbaik dalam implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik tingkat Kabupaten/Kota se Jawa Timur tahun 2012 dan tahun 2013. Kota Surabaya juga mendapat penghargaan sebagai Kabupaten/Kota terbaik dalam penerapan *e government* tahun 2013 tingkat Provinsi Jawa Timur. Selain itu Kota Surabaya juga mendapat nominasi penghargaan *United Nations Public Awards* kategori *Fostering Participation in Policy Making Decision Through Innovative Mechanism* tahun 2013, sebuah penghargaan untuk pemerintah yang telah berhasil mendorong partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik dengan cara-cara yang inovatif.

Dengan penghargaan-penghargaan yang diraih ini Kota Surabaya layak untuk dijadikan percontohan dalam hal transparansi penyelenggaraan pemerintahan. Nominasi dalam mendorong partisipasi juga sejalan tujuan keterbukaan informasi sebagaimana disebutkan dalam UU KIP bahwa keterbukaan informasi ini akan mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik.

Salah satu aspek yang dinilai dalam hal keterbukaan informasi adalah informasi yang tersedia pada website resmi badan publik. Sebagai sebuah media ada beberapa hal yang mempengaruhi isi pemberitaan website. Shoemaker dan Reese dalam *Mediating the Message* (1996) menyebutkan ada lima hal yang mempengaruhi isi pemberitaan media yaitu individu pekerja media, rutinitas media, organisasi media, kekuatan di luar media serta ideologi.

Website pemerintah kota Surabaya yang sudah beberapa kali memperoleh penghargaan dalam hal keterbukaan informasi tentu saja tidak lepas dari bagaimana individu-individu pengelola website memahami apa yang dimaksud dengan

transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dari pemahaman tentang konsep transparansi ini selanjutnya akan menentukan upaya-upaya apa yang akan dilakukan untuk memenuhi unsur-unsur transparansi tersebut. Untuk itulah perlu diteliti bagaimana persepsi pengelola website pemerintah Kota Surabaya tentang transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan serta upaya apa saja yang sudah dilakukan untuk mewujudkan hal tersebut dan apa saja isi pesan yang tersedia di website terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan seperti yang mereka pahami.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang di atas maka permasalahan dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- a. Bagaimana persepsi pengelola website Pemerintah Kota Surabaya tentang transparansi penyelenggaraan pemerintahan ?
- b. Upaya apa yang dilakukan oleh pengelola website Pemerintah Kota Surabaya dalam rangka mewujudkan transparansi penyelenggaraan pemerintahan ?
- c. Apa sajakah isi pesan yang terdapat pada website Pemerintah Kota Surabaya terkait transparansi penyelenggaraan pemerintahan tersebut?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

- a. Memahami persepsi pengelola Pemerintah Kota Surabaya tentang transparansi penyelenggaraan pemerintahan.
- b. Mendiskripsikan upaya yang dilakukan oleh pengelola website Pemerintah Kota Surabaya untuk mewujudkan transparansi penyelenggaraan pemerintahan.

- c. Mengidentifikasi isi pesan yang terdapat pada website Pemerintah Kota Surabaya terkait transparansi penyelenggaraan pemerintahan.

1.4 Signifikansi Penelitian

1.4.1 Signifikansi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu studi yang berkaitan dengan masalah transparansi penyelenggaraan pemerintahan dan pemanfaatan website sebagai media penyebarluasan informasi dan menampung partisipasi publik.

1.4.2 Signifikansi Praktis

- a. Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi yang objektif dan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi bagi pengelola website Pemerintah Kota Surabaya.
- b. Bagi instansi pemerintah lainnya sebagai bahan masukan dalam melaksanakan transparansi penyelenggaraan pemerintahan melalui website